

Analysis of the Role of Social Services in Handling Homeless Beggars (GEPENG) in Medan City (Case Study of Medan City Social Service)

Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)

Sri Sudiarti ¹⁾; Eldzan Izzahara Nasution ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ risudiarti@uinsu.ac.id; ²⁾ eldzanizzahara9@gmail.com

How to Cite :

Sudiarti, S., Nasution, E. I. (2022). Analysis of the Role of Social Services in Handling Homeless Beggars (GEPENG) in Medan City (Case Study of Medan City Social Service). Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]
Revised [15 Mei 2022]
Accepted [27 Mei 2022]

KEYWORDS

Social Service, Homeless People, Beggars

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidakberdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya pengangguran. Dampak positif dan negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam pembangunan, sehingga diperlukan usaha untuk lebih mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya. Gelandangan Pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Gelandangan Pengemis perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial. Masalah gelandangan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya terutama di Kota Medan. Dinas sosial adalah sebuah unsur pelaksanaan pemerintahan yang berwenang dalam kegiatan di bidang sosial. Dinas sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Dengan banyaknya gelandangan dan pengemis yang beredar di Kota Medan, maka peranan Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mendeskriptifkan dan menjelaskan peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota Medan.

ABSTRACT

Poverty is generally caused by the powerlessness of a person at working age, as well as the difficulty of getting a job or termination of employment due to the economic crisis that results in unemployment. Positive and negative impacts seem to be increasingly difficult to avoid in development, so efforts are needed to further develop the positive impacts of development and reduce and anticipate the negative impacts. Homeless beggars are one of the negative impacts of development, especially urban development. Homeless urban beggars are a phenomenon that is starting to be seen as a serious problem, especially with the increasing number of social problems. The problem of homeless beggars is a social phenomenon that cannot be

avoided, especially in the city of Medan. The social service is an element of government implementation that is authorized in activities in the social sector. The Social Service carries out the functions of administering government affairs and public services in the fields of social rehabilitation and social protection guarantees, social empowerment and handling the poor. With so many homeless and beggars circulating in the city of Medan, the role of the Social Service is very much needed in overcoming this problem. This study aims to find out how the role of social services in handling homeless and beggars (sprawl) in Medan City. This study uses a qualitative-descriptive method to describe and explain the role of the Social Service in handling homeless people and beggars in the city of Medan.

PENDAHULUAN

Gelandangan dan pengemis atau sering disingkat Gepeng. Mereka pemandangan umum di hampir semua kota di Indonesia. Ada banyak orang yang nasibnya kurang beruntung, sehingga terpaksa menggantungkan hidup di jalanan. Sebagian memilih menjadi pengasong, penyemir sepatu, pemulung dan pengamen. Sedangkan sebagiannya lagi menempuh jalan lebih pintas dalam mengais rezeki menjadi Pengemis. Penertiban Gepeng membutuhkan waktu untuk penanganannya, karena kadang diwaktu tertentu populasi Pengemis meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di pusat-pusat rekreasi dan perbelanjaan, tentunya secara grafik digambarkan jumlah populasi Pengemis naik turun. Penyebab kesenjangan yang besar adalah faktor ekonomi yang tidak merata sehingga jurang sosial antara si kaya dan si miskin tinggi terutama di kota-kota besar.

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di bidang sosial. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam perlindungan anak jalanan di kota Medan.

Di Sumatera Utara telah ada aturan mengenai gelandangan dan pengemis yaitu peraturan daerah kota medan Nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila di kota Medan. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah kota Medan Nomor 6 tahun 2003 yang berbunyi : ayat 1 "Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi belas kasihan orang lain"

LANDASAN TEORI

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di bidang sosial. Program Dinas Sosial meliputi :

- a. Bidang Rehabilitasi Sosial
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang rehabilitasi sosial merupakan salah satu bidang yang penting dalam dinas sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di lingkup Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja dinas.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur bidang rehabilitasi sosial.
- c. Penegakan kedisiplinan ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup rehabilitasi sosial berdasarkan undang-undang.
- d. Pengkoordinasi penerbitan rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalhgunaan napza.
- e. Pembinaan pengembangan serta pengendalian usaha pelayanan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, narapidana, waria dan ke daerah asalnya.

Bidang rehabilitasi sosial terdiri dari 3 penyuluh sosial yaitu :

1. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usi di luar panti. melaksanakan sebagian tugas kepala bidang rehabilitasi sosial lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti.
2. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti. melaksanakan sebagian tugas kepala bidang rehabilitasi sosial lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti.
3. Penyuluh sosial muda bidang rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang, melaksanakan sebagian tugas kepala rehabilitasi sosial lingkup rehabilitasi sosial tuna sosial, dan perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif- kualitatif merupakan penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara peneliti dan informan. Analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknis sebagai berikut: (1) Wawancara / interview adalah wawancara subjek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. (2) Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dan menggali data sekunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Medan beralamat di Jalan Pinang Baris/Jalan T.B Simatupang (belakang Terminal Pinang Baris No.114 B Medan).

Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Medan, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pada mulanya, Dinas Sosial Kota Medan masih bergabung dengan Dinas Tenaga Kerjaan yang disebut Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan (Dinsosnaker) sampai dengan tahun 2016. Setelah dikeluarnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan maka terbentuklah pada Tahun 2017 Dinas

Sosial Kota Medan berdiri sendiri dan pelaksanaan dalam pekerjaan diatur didalam Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah diBidang Sosial, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Medan

Visi

“ Kota Medan Menuju Kota Sejahtera Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat”.

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pekerja Sosial.
3. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan.
4. Mengembangkan System Informasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Berbasis IT.
5. Pembangunan Kompetensi SDM Bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Medan

Dari hasil wawancara oleh salah satu pegawai di dinas sosial tentang peran dinas sosial terhadap pengemis ada beberapa macam bentuk peran untuk pemberdayaan yang dilakukan dinas sosial kota medan yaitu :

1. Menekankan jumlah atau menekankan populasi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada dikota medan dengan cara menertibkan langsung kelapangan.
2. Melaksanakan kegiatan seperti pemberian pelatihan keterampilan
3. Memberikan keperluan kepada gelandangan dan pengemis yaitu dengan memberikan rumah singgah atau sembako.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jumlah gelandangan dan pengemis dikota medan sendiri sampai saat ini sudah mencapai ribuan orang. Strategi yang dilakukan dinas sosial kota medan dalam pemberdayaan dan penanganan para gelandangan dan pengemis ini yaitu dengan cara melakukan kegiatan kegiatan guna menunjang ketrampilan serta ilmu. Hambatan dinas sosial kota medan dalam melakukan penanganan ini yaitu :

1. Sulitnya pengawasan
2. Terbatas jumlah pegawai dinas sosial kota medan
3. Sulitnya pendekatan terhadap gelandangan dan pengemis yang dieksploitasi sebagai pekerja di jalanan ketika akan didata
4. Belum adanya rumah singgah untuk para gelandangan dan pengemis kota medan
5. Banyaknya orang sebagai gelandangan dan pengemis di jalanan yang berasal dari luar kota sehingga sangat sulit di data oleh dinas sosial kota medan.
6. Minimnya dana yang dianggarkan oleh pemko medan untuk kesejahteraan secara umum.

Di kota medan adanya peran penting masyarakat yakni dengan adanya lembaga yang mendukung hak manusia. Lembaga tersebut antara lain Kelompok Kerja Sosial Perkotaan Kota Medan yang bertujuan memerhatikan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta : Astha Media Grafika 2005.
- Chairika Nasution dan Husni Thamrin, Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan, 2016. Paulus, Widiyanto, Gelandangan, "Pandangan Ilmuan Sosial", Jakarta : LP3ES, 1986, hlm.2.
- Dissos.pemkomedan.go.id (2022, 18 Mei). Struktur Dinas Sosial Kota Medan. Diakses pada 18 Mei 2022, dari [https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read11/STRUKTUR DINAS SOSIAL-KOTA-MEDAN.html](https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read11/STRUKTUR_DINAS_SOSIAL-KOTA-MEDAN.html)
- Fachruddin, Administrasi Pendidikan, Medan, cipta pustaka, 2002, hlm.67.
- Hartinovmi, Sri, Petunjuk Teknis Rehabilitasi Gepeng, Yogyakarta : PSBK, 2014, hlm.2 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Panduan Pendataan Penyandang Masalah
- Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pegawai Di Dinas Sosial Kota Medan.
- Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi, hlm.8

- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015, hlm.4
- Soraya,Ira, Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 2017
- Tim Dinas Sosial DIY, 'Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Gelandangan dan Pengemis'. Yogyakarta: Dinas Sosial DIY Bidang Rehabilitasi Sosial, 2014, hlm.61.